



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 61 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bantuan keuangan yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Variabel Penduduk adalah jumlah penduduk dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
16. Variabel Kemiskinan adalah jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) miskin dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
17. Variabel Luas Desa meliputi Luas Wilayah Desa dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
18. Variabel Kesulitan Geografis Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 2

- (1) Jumlah Pengalokasian ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp180.421.421.000,00 (seratus delapan puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (2) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Madiun Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (3) Jumlah Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sebesar Rp2.118.146.000,00 (dua milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Perangkat Daerah; dan
  - b. sebesar Rp178.303.275.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dialokasikan kepada 198 (seratus sembilan puluh delapan) Desa untuk:
    1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
    2. pembangunan desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan;
    4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
    5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

BAB III  
TATA CARA PENGALOKASIAN ADD  
KEPADA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 20% (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

Pasal 4

- (1) Rumus dasar penetapan ADD adalah sebagai berikut:

$$\Sigma ADD = \Sigma (ADDM + ADDP)$$

Keterangan:

ADD = Alokasi Dana Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 60%

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabelnya) sebesar 40%

- (2) Formula Penerimaan ADD kepada setiap Desa:

- a. Rumus Penerimaan Desa

$$ADD \text{ Desa}_x = ADDM + BD_x (ADDP)$$

Keterangan:

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa

- b. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa ( $BD_x$ )

$$BD_x = (a_1 \times KV_1) + (a_2 \times KV_2) + \dots a_n \cdot KV_n$$

Keterangan:

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa

$a_1, a_2, \dots a_n$  = Angka bobot dari masing-masing variabel

$KV_1, KV_2, \dots KV_n$  = Koefisien masing-masing variabel

1. Rumus Koefisien Variabel  $Desa_x$

- a) KV Penduduk:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

- b) KV Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah ART Miskin}}{\text{Jumlah ART Miskin Kabupaten}}$$

- c) KV Luas Desa:

$$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Total Luas Desa dalam Kabupaten}}$$

- d) KV Kesulitan Geografis:

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Total Indeks Kesulitan Geografis Desa dalam Kabupaten}}$$



## 2. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	$V_1$	$a_1$	0,35
2. Kemiskinan	$V_2$	$a_2$	0,35
3. Luas Desa	$V_3$	$a_3$	0,10
4. Keterjangkauan	$V_4$	$a_4$	0,20

### Pasal 5

Penetapan Rincian Pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 63 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENGALOKASIAN  
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN  
 2022

RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MADIUN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	TOTAL ADD	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Balerejo	Babadan lor	540.312.954,00	307.002.817,36	847.315.771,36	847.316.000,00
2	Balerejo	Balerejo	540.312.954,00	393.943.474,85	934.256.428,85	934.256.000,00
3	Balerejo	Banaran	540.312.954,00	240.581.970,51	780.894.924,51	780.895.000,00
4	Balerejo	Bulakrejo	540.312.954,00	250.195.591,48	790.508.545,48	790.509.000,00
5	Balerejo	Gading	540.312.954,00	319.176.337,49	859.489.291,49	859.489.000,00
6	Balerejo	Garon	540.312.954,00	308.348.173,79	848.661.127,79	848.661.000,00
7	Balerejo	Glonggong	540.312.954,00	260.499.495,60	800.812.449,60	800.812.000,00

1	2	3	4	- 2 - 5	6	7
8	Balerejo	Jerukgulang	540.312.954,00	215.512.911,82	755.825.865,82	755.826.000,00
9	Balerejo	Kebonagung	540.312.954,00	301.098.822,78	841.411.776,78	841.412.000,00
10	Balerejo	Kedungjati	540.312.954,00	219.930.464,19	760.243.418,19	760.243.000,00
11	Balerejo	Kedungrejo	540.312.954,00	347.885.947,85	888.198.901,85	888.199.000,00
12	Balerejo	Kuwu	540.312.954,00	329.207.651,03	869.520.605,03	869.521.000,00
13	Balerejo	Pacinan	540.312.954,00	268.925.055,14	809.238.009,14	809.238.000,00
14	Balerejo	Simo	540.312.954,00	301.692.491,50	842.005.445,50	842.005.000,00
15	Balerejo	Sogo	540.312.954,00	403.197.170,16	943.510.124,16	943.510.000,00
16	Balerejo	Sumberbening	540.312.954,00	297.590.169,71	837.903.123,71	837.903.000,00
17	Balerejo	Tapelan	540.312.954,00	226.479.600,55	766.792.554,55	766.793.000,00
18	Balerejo	Warurejo	540.312.954,00	239.979.767,09	780.292.721,09	780.293.000,00
19	Dagangan	Banjarejo	540.312.954,00	195.952.227,42	736.265.181,42	736.265.000,00
20	Dagangan	Banjarsari Kulon	540.312.954,00	485.996.807,64	1.026.309.761,64	1.026.310.000,00
21	Dagangan	Banjarsari Wetan	540.312.954,00	335.919.358,28	876.232.312,28	876.232.000,00
22	Dagangan	Dagangan	540.312.954,00	318.304.465,39	858.617.419,39	858.617.000,00
23	Dagangan	Jetis	540.312.954,00	261.750.921,64	802.063.875,64	802.064.000,00
24	Dagangan	Joho	540.312.954,00	282.352.250,82	822.665.204,82	822.665.000,00
25	Dagangan	Kepet	540.312.954,00	223.495.711,29	763.808.665,29	763.809.000,00
26	Dagangan	Ketandan	540.312.954,00	430.119.375,13	970.432.329,13	970.432.000,00
27	Dagangan	Mendak	540.312.954,00	173.110.242,03	713.423.196,03	713.423.000,00
28	Dagangan	Mruwak	540.312.954,00	332.090.840,55	872.403.794,55	872.404.000,00
29	Dagangan	Ngranget	540.312.954,00	299.720.719,00	840.033.673,00	840.034.000,00
30	Dagangan	Padas	540.312.954,00	216.935.737,54	757.248.691,54	757.249.000,00
31	Dagangan	Prambon	540.312.954,00	215.061.565,62	755.374.519,62	755.375.000,00
32	Dagangan	Segulung	540.312.954,00	468.981.498,12	1.009.294.452,12	1.009.294.000,00
33	Dagangan	Sewulan	540.312.954,00	362.392.050,04	902.705.004,04	902.705.000,00
34	Dagangan	Sukosari	540.312.954,00	315.724.705,08	856.037.659,08	856.038.000,00

1	2	3	4	- 3 - 5	6	7
35	Dagangan	Tileng	540.312.954,00	222.180.105,96	762.493.059,96	762.493.000,00
36	Dolopo	Bader	540.312.954,00	349.977.600,63	890.290.554,63	890.291.000,00
37	Dolopo	Blimbing	540.312.954,00	274.758.387,43	815.071.341,43	815.071.000,00
38	Dolopo	Candimulyo	540.312.954,00	442.011.344,50	982.324.298,50	982.324.000,00
39	Dolopo	Doho	540.312.954,00	298.524.965,71	838.837.919,71	838.838.000,00
40	Dolopo	Dolopo	540.312.954,00	613.476.365,26	1.153.789.319,26	1.153.789.000,00
41	Dolopo	Glonggong	540.312.954,00	543.818.176,69	1.084.131.130,69	1.084.131.000,00
42	Dolopo	Ketawang	540.312.954,00	255.787.826,00	796.100.780,00	796.101.000,00
43	Dolopo	Kradinan	540.312.954,00	353.963.429,45	894.276.383,45	894.276.000,00
44	Dolopo	Lembah	540.312.954,00	335.878.124,53	876.191.078,53	876.191.000,00
45	Dolopo	Suluk	540.312.954,00	308.004.719,99	848.317.673,99	848.318.000,00
46	Geger	Banaran	540.312.954,00	277.161.839,91	817.474.793,91	817.475.000,00
47	Geger	Geger	540.312.954,00	350.753.377,05	891.066.331,05	891.066.000,00
48	Geger	Jatisari	540.312.954,00	517.375.095,60	1.057.688.049,60	1.057.688.000,00
49	Geger	Jogodayuh	540.312.954,00	295.772.244,67	836.085.198,67	836.085.000,00
50	Geger	Kaibon	540.312.954,00	344.724.039,87	885.036.993,87	885.037.000,00
51	Geger	Kertobanyon	540.312.954,00	163.922.740,79	704.235.694,79	704.236.000,00
52	Geger	Kertosari	540.312.954,00	268.481.758,57	808.794.712,57	808.795.000,00
53	Geger	Klorogan	540.312.954,00	251.383.951,37	791.696.905,37	791.697.000,00
54	Geger	Kranggan	540.312.954,00	267.402.458,63	807.715.412,63	807.715.000,00
55	Geger	Nglandung	540.312.954,00	383.172.124,32	923.485.078,32	923.485.000,00
56	Geger	Pagotan	540.312.954,00	235.150.232,57	775.463.186,57	775.463.000,00
57	Geger	Purworejo	540.312.954,00	467.813.524,29	1.008.126.478,29	1.008.126.000,00
58	Geger	Putat	540.312.954,00	341.737.837,58	882.050.791,58	882.051.000,00
59	Geger	Sambirejo	540.312.954,00	284.565.006,06	824.877.960,06	824.878.000,00
60	Geger	Sangen	540.312.954,00	301.248.865,98	841.561.819,98	841.562.000,00

1	2	3	4	- 4 - 5	6	7
61	Geger	Sareng	540.312.954,00	252.001.969,33	792.314.923,33	792.315.000,00
62	Geger	Slambur	540.312.954,00	201.700.463,02	742.013.417,02	742.013.000,00
63	Geger	Sumberejo	540.312.954,00	289.818.008,01	830.130.962,01	830.131.000,00
64	Geger	Uteran	540.312.954,00	294.777.443,93	835.090.397,93	835.090.000,00
65	Gemarang	Batok	540.312.954,00	720.104.959,61	1.260.417.913,61	1.260.418.000,00
66	Gemarang	Durenan	540.312.954,00	567.065.261,18	1.107.378.215,18	1.107.378.000,00
67	Gemarang	Gemarang	540.312.954,00	627.341.017,61	1.167.653.971,61	1.167.654.000,00
68	Gemarang	Nampu	540.312.954,00	584.703.553,29	1.125.016.507,29	1.125.017.000,00
69	Gemarang	Sebayi	540.312.954,00	276.516.618,03	816.829.572,03	816.830.000,00
70	Gemarang	Tawangrejo	540.312.954,00	1.068.075.610,15	1.608.388.564,15	1.608.389.000,00
71	Gemarang	Winong	540.312.954,00	721.244.232,23	1.261.557.186,23	1.261.557.000,00
72	Jiwan	Bedoho	540.312.954,00	165.138.853,88	705.451.807,88	705.452.000,00
73	Jiwan	Bibrik	540.312.954,00	389.797.379,63	930.110.333,63	930.110.000,00
74	Jiwan	Bukur	540.312.954,00	312.482.087,03	852.795.041,03	852.795.000,00
75	Jiwan	Grobogan	540.312.954,00	376.653.138,36	916.966.092,36	916.966.000,00
76	Jiwan	Jiwan	540.312.954,00	473.668.828,32	1.013.981.782,32	1.013.982.000,00
77	Jiwan	Kincang Wetan	540.312.954,00	487.564.291,81	1.027.877.245,81	1.027.877.000,00
78	Jiwan	Klagenserut	540.312.954,00	406.655.007,38	946.967.961,38	946.968.000,00
79	Jiwan	Kwangsen	540.312.954,00	290.587.379,18	830.900.333,18	830.900.000,00
80	Jiwan	Metesih	540.312.954,00	372.297.896,18	912.610.850,18	912.611.000,00
81	Jiwan	Ngetrep	540.312.954,00	230.511.157,60	770.824.111,60	770.824.000,00
82	Jiwan	Sambirejo	540.312.954,00	326.437.141,50	866.750.095,50	866.750.000,00
83	Jiwan	Sukolilo	540.312.954,00	344.172.435,79	884.485.389,79	884.485.000,00
84	Jiwan	Teguhan	540.312.954,00	401.327.579,81	941.640.533,81	941.641.000,00
85	Jiwan	Wayut	540.312.954,00	432.308.235,50	972.621.189,50	972.621.000,00
86	Kare	Bodag	540.312.954,00	386.295.732,83	926.608.686,83	926.609.000,00

1	2	3	4	- 5 - 5	6	7
87	Kare	Bolo	540.312.954,00	296.718.988,31	837.031.942,31	837.032.000,00
88	Kare	Cermo	540.312.954,00	672.377.411,97	1.212.690.365,97	1.212.690.000,00
89	Kare	Kare	540.312.954,00	1.213.529.762,41	1.753.842.716,41	1.753.843.000,00
90	Kare	Kepel	540.312.954,00	542.480.848,29	1.082.793.802,29	1.082.794.000,00
91	Kare	Kuwiran	540.312.954,00	281.218.641,36	821.531.595,36	821.532.000,00
92	Kare	Morang	540.312.954,00	699.568.087,60	1.239.881.041,60	1.239.881.000,00
93	Kare	Randualas	540.312.954,00	765.996.209,50	1.306.309.163,50	1.306.309.000,00
94	Kebonsari	Bacem	540.312.954,00	188.450.947,55	728.763.901,55	728.764.000,00
95	Kebonsari	Balerejo	540.312.954,00	301.846.412,11	842.159.366,11	842.159.000,00
96	Kebonsari	Kebonsari	540.312.954,00	513.470.334,33	1.053.783.288,33	1.053.783.000,00
97	Kebonsari	Kedondong	540.312.954,00	423.901.932,24	964.214.886,24	964.215.000,00
98	Kebonsari	Krandegan	540.312.954,00	421.388.749,49	961.701.703,49	961.702.000,00
99	Kebonsari	Mojorejo	540.312.954,00	258.187.814,67	798.500.768,67	798.501.000,00
100	Kebonsari	Palur	540.312.954,00	275.010.653,30	815.323.607,30	815.324.000,00
101	Kebonsari	Puncanganom	540.312.954,00	451.574.550,54	991.887.504,54	991.888.000,00
102	Kebonsari	Rejosari	540.312.954,00	420.114.439,00	960.427.393,00	960.427.000,00
103	Kebonsari	Sidorejo	540.312.954,00	310.896.861,56	851.209.815,56	851.210.000,00
104	Kebonsari	Singgahan	540.312.954,00	282.139.529,31	822.452.483,31	822.452.000,00
105	Kebonsari	Sukorejo	540.312.954,00	344.894.871,41	885.207.825,41	885.208.000,00
106	Kebonsari	Tambakmas	540.312.954,00	449.843.354,35	990.156.308,35	990.156.000,00
107	Kebonsari	Tanjungrejo	540.312.954,00	424.984.946,27	965.297.900,27	965.298.000,00
108	Madiun	Bagi	540.312.954,00	370.986.205,36	911.299.159,36	911.299.000,00
109	Madiun	Banjarsari	540.312.954,00	281.845.200,25	822.158.154,25	822.158.000,00
110	Madiun	Betek	540.312.954,00	214.251.810,30	754.564.764,30	754.565.000,00
111	Madiun	Dempelan	540.312.954,00	310.738.261,13	851.051.215,13	851.051.000,00
112	Madiun	Dimong	540.312.954,00	305.493.105,06	845.806.059,06	845.806.000,00

1	2	3	4	- 6 - 5	6	7
113	Madiun	Gunungsari	540.312.954,00	237.622.591,56	777.935.545,56	777.936.000,00
114	Madiun	Sendangrejo	540.312.954,00	204.188.477,22	744.501.431,22	744.501.000,00
115	Madiun	Sirapan	540.312.954,00	337.308.796,21	877.621.750,21	877.622.000,00
116	Madiun	Sumberejo	540.312.954,00	286.148.912,93	826.461.866,93	826.462.000,00
117	Madiun	Tanjungrejo	540.312.954,00	196.705.671,61	737.018.625,61	737.019.000,00
118	Madiun	Tiron	540.312.954,00	336.285.902,64	876.598.856,64	876.599.000,00
119	Madiun	Tulungrejo	540.312.954,00	256.452.755,88	796.765.709,88	796.766.000,00
120	Mejayan	Blabakan	540.312.954,00	276.266.197,85	816.579.151,85	816.579.000,00
121	Mejayan	Darmorejo	540.312.954,00	506.424.445,99	1.046.737.399,99	1.046.737.000,00
122	Mejayan	Kaliabu	540.312.954,00	535.225.772,79	1.075.538.726,79	1.075.539.000,00
123	Mejayan	Kaligunting	540.312.954,00	357.534.032,35	897.846.986,35	897.847.000,00
124	Mejayan	Kebonagung	540.312.954,00	514.353.006,02	1.054.665.960,02	1.054.666.000,00
125	Mejayan	Klecorejo	540.312.954,00	285.232.493,22	825.545.447,22	825.545.000,00
126	Mejayan	Kuncen	540.312.954,00	142.607.197,68	682.920.151,68	682.920.000,00
127	Mejayan	Mejayan	540.312.954,00	361.073.520,86	901.386.474,86	901.386.000,00
128	Mejayan	Ngampel	540.312.954,00	325.682.181,75	865.995.135,75	865.995.000,00
129	Mejayan	Sidodadi	540.312.954,00	298.080.678,26	838.393.632,26	838.394.000,00
130	Mejayan	Wonorejo	540.312.954,00	425.310.479,01	965.623.433,01	965.623.000,00
131	Pilangkenceng	Bulu	540.312.954,00	362.932.095,29	903.245.049,29	903.245.000,00
132	Pilangkenceng	Dawuhan	540.312.954,00	255.006.801,93	795.319.755,93	795.320.000,00
133	Pilangkenceng	Duren	540.312.954,00	538.603.778,72	1.078.916.732,72	1.078.917.000,00
134	Pilangkenceng	Gandul	540.312.954,00	440.159.317,81	980.472.271,81	980.472.000,00
135	Pilangkenceng	Kedungbanteng	540.312.954,00	287.976.716,15	828.289.670,15	828.290.000,00
136	Pilangkenceng	Kedungmaron	540.312.954,00	284.170.995,35	824.483.949,35	824.484.000,00
137	Pilangkenceng	Kedungrejo	540.312.954,00	323.918.481,53	864.231.435,53	864.231.000,00
138	Pilangkenceng	Kenongorejo	540.312.954,00	466.690.155,35	1.007.003.109,35	1.007.003.000,00

1	2	3	4	- 7 - 5	6	7
139	Pilangkenceng	Krebet	540.312.954,00	306.902.954,39	847.215.908,39	847.216.000,00
140	Pilangkenceng	Luworo	540.312.954,00	443.339.747,96	983.652.701,96	983.653.000,00
141	Pilangkenceng	Muneng	540.312.954,00	170.122.475,41	710.435.429,41	710.435.000,00
142	Pilangkenceng	Ngale	540.312.954,00	303.008.176,36	843.321.130,36	843.321.000,00
143	Pilangkenceng	Ngengor	540.312.954,00	272.748.147,32	813.061.101,32	813.061.000,00
144	Pilangkenceng	Pilangkenceng	540.312.954,00	353.542.549,15	893.855.503,15	893.856.000,00
145	Pilangkenceng	Pulerejo	540.312.954,00	368.171.520,58	908.484.474,58	908.484.000,00
146	Pilangkenceng	Purworejo	540.312.954,00	278.786.308,69	819.099.262,69	819.099.000,00
147	Pilangkenceng	Sumbergandu	540.312.954,00	276.934.197,59	817.247.151,59	817.247.000,00
148	Pilangkenceng	Wonoayu	540.312.954,00	226.155.140,03	766.468.094,03	766.468.000,00
149	Saradan	Bajulan	540.312.954,00	295.538.805,80	835.851.759,80	835.852.000,00
150	Saradan	Bandungan	540.312.954,00	608.298.399,67	1.148.611.353,67	1.148.611.000,00
151	Saradan	Bener	540.312.954,00	326.767.230,73	867.080.184,73	867.080.000,00
152	Saradan	Bongsopotro	540.312.954,00	293.052.152,14	833.365.106,14	833.365.000,00
153	Saradan	Klangon	540.312.954,00	489.146.686,35	1.029.459.640,35	1.029.460.000,00
154	Saradan	Klumutan	540.312.954,00	795.429.399,95	1.335.742.353,95	1.335.742.000,00
155	Saradan	Ngepeh	540.312.954,00	194.412.352,19	734.725.306,19	734.725.000,00
156	Saradan	Pajaran	540.312.954,00	900.718.313,33	1.441.031.267,33	1.441.031.000,00
157	Saradan	Sambirejo	540.312.954,00	288.003.703,24	828.316.657,24	828.317.000,00
158	Saradan	Sidorejo	540.312.954,00	600.270.082,27	1.140.583.036,27	1.140.583.000,00
159	Saradan	Sugihwaras	540.312.954,00	828.488.220,37	1.368.801.174,37	1.368.801.000,00
160	Saradan	Sukorejo	540.312.954,00	417.796.779,70	958.109.733,70	958.110.000,00
161	Saradan	Sumberbendo	540.312.954,00	616.108.977,34	1.156.421.931,34	1.156.422.000,00
162	Saradan	Sumbersari	540.312.954,00	371.842.690,44	912.155.644,44	912.156.000,00
163	Saradan	Tulung	540.312.954,00	785.178.564,55	1.325.491.518,55	1.325.492.000,00
164	Sawah	Bakur	540.312.954,00	203.532.911,86	743.845.865,86	743.846.000,00



1	2	3	4	- 8 - 5	6	7
165	Sawahan	Cabean	540.312.954,00	225.943.610,59	766.256.564,59	766.257.000,00
166	Sawahan	Golan	540.312.954,00	216.464.653,03	756.777.607,03	756.778.000,00
167	Sawahan	Kajang	540.312.954,00	148.514.176,66	688.827.130,66	688.827.000,00
168	Sawahan	Kanung	540.312.954,00	182.000.292,75	722.313.246,75	722.313.000,00
169	Sawahan	Klumpit	540.312.954,00	169.882.239,59	710.195.193,59	710.195.000,00
170	Sawahan	Krokeh	540.312.954,00	154.708.975,34	695.021.929,34	695.022.000,00
171	Sawahan	Lebakayu	540.312.954,00	230.752.001,92	771.064.955,92	771.065.000,00
172	Sawahan	Pucangrejo	540.312.954,00	257.412.700,82	797.725.654,82	797.726.000,00
173	Sawahan	Pule	540.312.954,00	127.667.356,96	667.980.310,96	667.984.000,00
174	Sawahan	Rejosari	540.312.954,00	262.665.541,95	802.978.495,95	802.978.000,00
175	Sawahan	Sawahan	540.312.954,00	206.563.115,82	746.876.069,82	746.876.000,00
176	Sawahan	Sidomulyo	540.312.954,00	320.210.774,42	860.523.728,42	860.524.000,00
177	Wonoasri	Bancong	540.312.954,00	242.967.246,62	783.280.200,62	783.280.000,00
178	Wonoasri	Banyukambang	540.312.954,00	256.465.435,99	796.778.389,99	796.778.000,00
179	Wonoasri	Buduran	540.312.954,00	304.747.255,81	845.060.209,81	845.060.000,00
180	Wonoasri	Jatirejo	540.312.954,00	300.594.935,12	840.907.889,12	840.908.000,00
181	Wonoasri	Klitik	540.312.954,00	266.799.436,38	807.112.390,38	807.112.000,00
182	Wonoasri	Ngadirejo	540.312.954,00	533.196.461,73	1.073.509.415,73	1.073.509.000,00
183	Wonoasri	Plumpungrejo	540.312.954,00	532.423.304,88	1.072.736.258,88	1.072.736.000,00
184	Wonoasri	Purwosari	540.312.954,00	328.090.042,70	868.402.996,70	868.403.000,00
185	Wonoasri	Sidomulyo	540.312.954,00	449.250.325,76	989.563.279,76	989.563.000,00
186	Wonoasri	Wonoasri	540.312.954,00	250.205.223,04	790.518.177,04	790.518.000,00
187	Wungu	Bantengan	540.312.954,00	407.135.357,23	947.448.311,23	947.448.000,00
188	Wungu	Brumbun	540.312.954,00	264.759.700,57	805.072.654,57	805.073.000,00
189	Wungu	Karangrejo	540.312.954,00	390.846.766,50	931.159.720,50	931.160.000,00
190	Wungu	Kresek	540.312.954,00	413.778.109,25	954.091.063,25	954.091.000,00

1	2	3	4	- 9 - 5	6	7
191	Wungu	Mojopurno	540.312.954,00	392.126.070,88	932.439.024,88	932.439.000,00
192	Wungu	Mojorayung	540.312.954,00	544.912.351,12	1.085.225.305,12	1.085.225.000,00
193	Wungu	Nglambangan	540.312.954,00	351.131.460,72	891.444.414,72	891.444.000,00
194	Wungu	Nglanduk	540.312.954,00	341.734.519,13	882.047.473,13	882.047.000,00
195	Wungu	Pilangrejo	540.312.954,00	240.114.428,02	780.427.382,02	780.427.000,00
196	Wungu	Sidorejo	540.312.954,00	592.706.588,48	1.133.019.542,48	1.133.020.000,00
197	Wungu	Sobrah	540.312.954,00	239.037.226,00	779.350.180,00	779.350.000,00
198	Wungu	Tempursari	540.312.954,00	399.885.630,07	940.198.584,07	940.199.000,00
TOTAL ADD			106.981.964.892,00	71.321.310.000,00	178.303.274.892,00	178.303.275.000,00

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO